

**FUNGSI LURAH SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN PENRANG KECAMATAN WATTANG SAWITO
KABUPATEN PINRANG**



BOSOWA

Oleh :

SYAMSURIATY RAHMAN

45 97 021 048

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **“Fungsi Lurah Sebagai Administrator Pembangunan di
Kelurahan Penrang Kecamatan Wattang Sawitto
Kabupaten Pinrang”**

Nama Mahasiswa : SYAMSURIATY RAHMAN
Stambuk : 45 97 021 048
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Juharni, M.Si


Drs. M. Rusdi Maidin, M.Si

Mengetahui,

Dekan Fisipol Universitas “45”,

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi



Dra. H. Nurmi Nonci, MSi


Drs. Marten D. Palobo, M.Si

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Fungsi Lurah Sebagai Administrator Pembangunan di Kelurahan Penrang Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang. Secara esensial, penelitian ini berorientasi kepada keinginan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kepala Kelurahan dalam Administrator Pembangunan.

Untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian studi khusus, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif yang dilakukan dengan menguraikan atau menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diamati.

Secara deskriptif hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Kelurahan Penrang dalam menjalankan fungsinya sudah mampu mempengaruhi atau menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana berkomunikasi dengan baik pada masyarakat terbuka, mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, serta percaya pada diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dengan judul **“Fungsi Lurah sebagai Administrator Pembangunan di Kelurahan Penrang Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang”**.

Dalam penulisan ini, saya menyadari dengan kesungguhan hati kelemahan dan kekurangan sehingga diharapkan kepada pembaca terutama yang berpengalaman di bidang ini untuk menuangkan pola pikirnya sebagai langkah awal menuju kesempurnaan.

Untuk itu ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Ir. Darwis Panguriseng, MSc., selaku Rektor Universitas “45” Makassar.
2. Bapak Drs. Husain Hamka, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar.
3. Ibu Dra. Juharni, M.Si., selaku pembimbing pertama yang senantiasa memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Rusdi Maidin, M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan dorongan sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abd. Rahman, S.IP., selaku Lurah Penrang yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir.

6. Seluruh staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar yang telah membantu dan mengajar penulis.
7. Ayah dan Ibunda yang telah memberikan perjuangan dan pengorbanan baik fisik, materi maupun moral serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
8. Seluruh saudara tercinta yang tak hentinya memberikan dorongan semangat, sampai pada tulisan ini rangkum.

Dan tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar, maupun teman-teman yang ada dipondokan Intishar yang tidak dapat penulis sebut namanya satu-persatu atas dukungan moralnya.

Harapan penulis semoga tulisan ini akan bermanfaat dan akan menjadi dasar studi yang lebih mendalam di masa yang akan datang, khususnya penulis sendiri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan.

Makassar, November 2002

Penulis

| | |
|--|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 37 |
| A. Pelaksanaan Lurah Penrang Menjalankan Fungsinya sebagai Administrator Pembangunan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat | 37 |
| B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Lurah Penrang dalam melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan | 46 |
| BAB V PENUTUP | 53 |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Saran-saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Teks | Halaman |
|-----------|--|---------|
| 1 | Luas Tanah Menurut Kegunaannya Di Kelurahan Penrang Tahun 2002 | 30 |
| 2 | Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Di Kelurahan Penrang Tahun 2002 | 31 |
| 3 | Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kelurahan Penrang Tahun 2002 | 33 |
| 4 | Tingkat Pendidikan di Kelurahan Penrang Tahun 2002 | 34 |
| 5 | Komposisi Penduduk Menurut Agama Di Kelurahan Penrang Tahun 2002 | 34 |
| 6 | Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Perdagangan Di Kelurahan Penrang Tahun 2002..... | 39 |
| 7 | Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Perhubungan Di Kelurahan Penrang Tahun 2002..... | 40 |
| 8 | Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Kesehatan Di Kelurahan Penrang Tahun 2002 | 42 |
| 9 | Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Pendidikan Di Kelurahan Penrang Tahun 2002..... | 44 |
| 10 | Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Keagamaan Di Kelurahan Penrang Tahun 2002..... | 45 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan nasional adalah merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat, baik materil maupun spirituil. Dimana pembangunan itu sendiri dimaksudkan agar supaya apa yang dilakukan dalam pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Namun demikian pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dewasa ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga tanggung jawab kita semua, oleh karena itu dalam pembangunan atau dalam rangka keberhasilan pembangunan dituntut adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Di samping itu dalam melaksanakan pembangunan maka pihak pemerintah dengan segala upaya dapat memanfaatkan segala potensi daerah guna membiayai pembangunan. Kendatipun demikian perlu adanya kepemimpinan yang baik dari pihak pemerintah yang dalam hal ini aparat pelaksana pembangunan, sebab kepemimpinan pemerintah pada semua tingkat pemerintah mempunyai posisi yang strategis dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai kerangka operasional dan disusun

menurut landasan idil Pancasila dan UUD 1945, sebagai landasan konstitusional. Pada bab II pola dasar pembangunan nasional dijelaskan bahwa :

“Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, tertib dan damai”. (TAP MPR No. II/1993:12).

Dari penegasan tersebut di atas, maka untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan suatu proses pembangunan yang terus menerus dilakukan secara berkesinambungan, utamanya pembangunan di Kelurahan, karena pembangunan di Kelurahan adalah merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional dan mempunyai arti yang sangat strategi, karena secara keseluruhan Kelurahan merupakan landasan atau basis ketahanan nasional bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan di Kelurahan meliputi beberapa aspek yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, agama, pertahanan dan keamanan. Untuk itu maka pembangunan di Kelurahan pada prinsipnya diusahakan agar mengandung kemampuan mengatasi segala hambatan dan tantangan dalam rangka pembinaan ketertiban dan stabilitas nasional secara keseluruhan.

Dengan adanya aspek pembangunan Kelurahan selaku administrator pembangunan mempunyai peranan yang sangat besar sebagai penguasa di Kelurahannya, maka seorang kepala kelurahan memiliki tugas yang sangat

berat baik terhadap masyarakat, maupun terhadap pemerintah tingkat atasnya.

Sesuai dengan UU Bab III tentang tugas Lurah dijelaskan bahwa :
“Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.” (2001: 4).

Oleh karena itu seorang kepala Kelurahan dituntut agar memiliki kemampuan yang memadai sehingga dalam tahap perkembangan kelurahannya sebagai konseksi dari tanggung jawabnya untuk mensukseskan pembangunan di segala bidang di Kelurahan.

Berbicara mengenai kemampuan seorang kepala Kelurahan maka tidak terlepas dari apa yang dinamakan fungsi kepala Kelurahan, dan berbicara mengenai fungsi kepala Kelurahan tidak terlepas dari administrasi pembangunan, berbicara mengenai administrasi pembangunan maka tidak terlepas dari situasi masyarakat setempat.

Di samping untuk mengetahui bagaimana Lurah dalam menjalankan fungsinya sebagai administrasi pembangunan yang merupakan sumber dari pada penulisan skripsi ini juga tidak kalah pentingnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Lurah Penrang dalam melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan.

Masalah utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Penrang adalah di samping karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman dari pembangunan juga adalah

keterbatasan dana yang disediakan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Bertolak dari kenyataan tersebut di atas dimana kendala masih sering ditemukan, Kepala Kelurahan sebagai administrator pembangunan dianggap gagal apabila tidak mampu mengendalikan pemerintah diwilayahnya, sehingga akan berpengaruh pula pada tingkat Kecamatan dan akhirnya sampai ke pusat.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Sebagaimana yang penulis telah kemukakan sebelumnya bahwa pembangunan nasional sekarang ini sasarannya diprioritaskan dan ditujukan pada pembangunan Kelurahan, oleh karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah berdomisili di Kelurahan sehingga untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dilakukan pemerataan utamanya di bidang pembangunan, juga karena pembangunan Kelurahan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam hal ini peranan Kepala Kelurahan sebagai pelopor dalam pembangunan Kelurahan memegang peranan yang sangat penting, di samping adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kedua faktor ini tidak dapat dipisahkan, disatu pihak pembangunan Kelurahan mutlak memerlukan partisipasi dari seluruh



masyarakat sebagai sumber utama pembangunan Kelurahan yang terus menerus dilaksanakan dan diarahkan kepada tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembangunan Kelurahan.

Dan di lain pihak diperlukan adanya tenaga penggerak yang dalam hal ini Kepala Kelurahan untuk menggerakkan daya yang ada atau dengan kata lain bahwa suksesnya pembangunan Kelurahan adalah terletak pada bagaimana Kepala Kelurahan berperan dalam menggerakkan masyarakat sehingga tumbuh suatu kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan.

Mengingat kedudukannya, sebagai Kepala Wilayah juga adalah penguasa tunggal dalam pemerintahannya, ini mengandung arti bahwa Lurah sebagai pemimpin yang mengkoordinir sekian banyak fungsi, meliputi segi kehidupan ekonomi, dan sosial budaya maupun yang menyangkut masalah keamanan dan ketertiban.

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah hanya membahas satu fungsi yaitu pelaksanaan Lurah dalam menjalankan tugas sebagai administrator, dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas sehingga untuk mencegah kesimpangsiuran permasalahan di dalam penelitian ini maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Lurah Penrang menjalankan fungsinya sebagai administrator dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, di bidang

Perdagangan, bidang perhubungan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang keagamaan ?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Lurah Penrang dalam melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Lurah Penrang menjalankan fungsinya sebagai administrator pembangunan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, dibidang perdagangan, bidang perhubungan, bidang administrator pembagunan, dalam hal pendidikan dan mentalitas, kepemimpinan /segi pemerintahan, kesaadaran masyaakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Lurah Penrang dalam menjalankan fungsinya sebagai administerator pembagunan, dalam hal pendidikan dan mentalitas, kepemimpinan / segi pemerintahan, kesadaran masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan berguna agar dapat memberikan masukan dalam menunjang pembagunan di Kelurahan Penrang.
- b. Bagi rekan-rekan mahasiswa, hasil penelitian ini dapat merupakan salah satu bahan informasi guna penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Untuk penulis sendiri, hasil penelitian ini berguna sebagai suatu pengalaman keilmuan dan keilmiahannya juga sebagai bahan referensi dimasa mendatang.

D. Kerangka Konseptual

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional UU No. 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, menyangkut adanya kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Ditinjau dari segi potensinya, baik secara demografis maupun secara geografis, politik, ekonomi dan sosial budaya masih diperlukan adanya upaya-upaya pengendalian dan pendayagunaan serta pembangunan yang menyeluruh, terarah dan sasaran pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung melalui program pembangunan itu sendiri, pembangunan lokal, pembangunan regional, pembangunan nasional serta pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah Kelurahan.

Oleh sebab itu setiap aparat pemerintah Kelurahan terutama Kepala Kelurahan memiliki kewajiban untuk memelihara sendi-sendi hidup masyarakat Kelurahan yang masih murni, kemudian melakukan pembinaan dan pengembangan dengan berbagai upaya pembaharuan yang pantas dan bijaksana.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan masyarakat Kelurahan adalah bagaimana menemukan cara efektif untuk mendorong dan mengajar mereka untuk mempergunakan metode-metode baru. Untuk

mempelajari keahlian atau keterampilan baru yang mereka butuhkan dengan lebih baik.

Hal tersebut di atas merupakan salah satu aspek dari sekian banyak aspek yang dapat mempengaruhi perubahan atau pertumbuhan masyarakat dalam pembangunan. Kemudian aspek lain yang penting diperhatikan adalah bagaimana menolong masyarakat menyesuaikan cara hidup mereka dengan adanya sistem teknologi yang semakin maju dalam rangka pembangunan dewasa ini.

Seperti yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Administrasi Pembangunan bahwa :

“Sebagai unsur pembaharu, peran para administrator dalam birokrasi pemerintahan secara khusus adalah kemampuannya untuk mendasari strategis usaha berencana yang mendorong ke arah pembaharuan dan pembangunan, dalam berbagai kebijaksanaan atau dalam suatu rencana maupun dalam realisasi pelaksanaannya”. (1974:13).

Dalam hubungannya dengan pembangunan sebagai objek perencanaan dan pembaharuan ini maka oleh Dr. Sondang P. Siagian, MPA., dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pembangunan bahwa :

“Sebagai suatu rencana atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan dalam rangka pembinaan bangsa”. (1979:15).

Dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa pembangunan itu merupakan upaya perbaikan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, maka pembangunan bukan hanya menjadi urusan seseorang atau kelompok tertentu

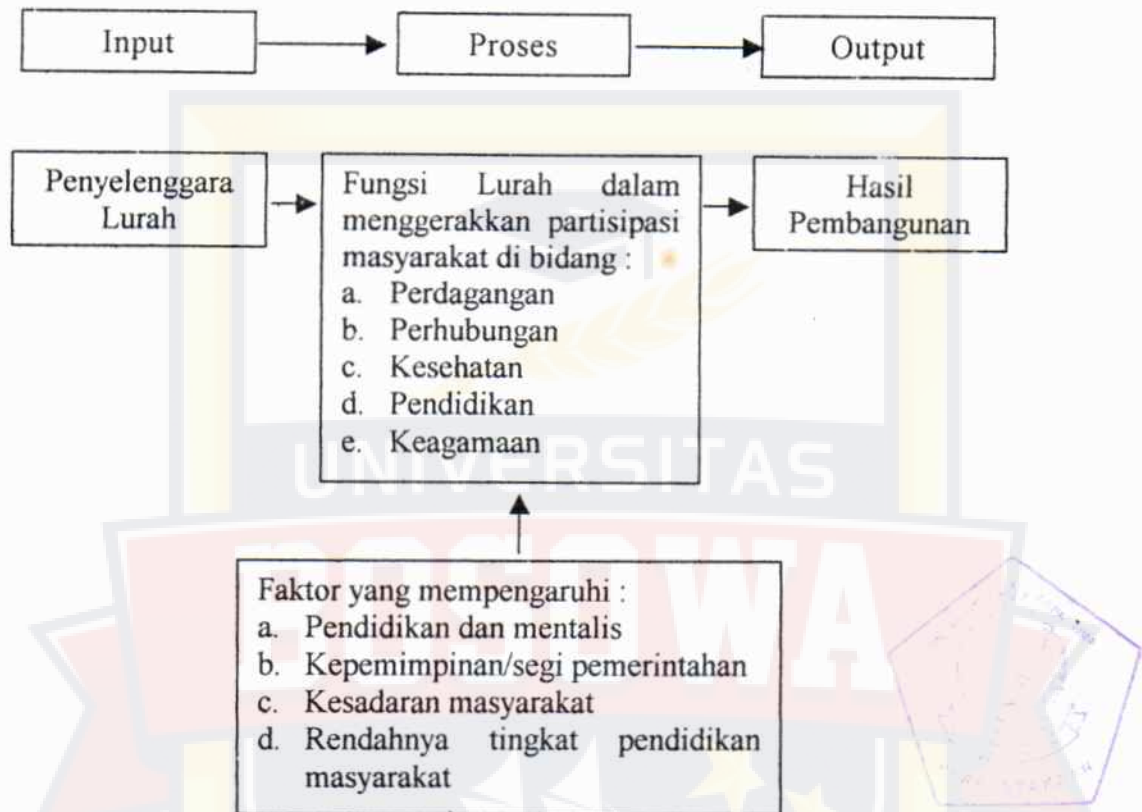
dalam suatu negara, tetapi harus melibatkan semua unsur, baik pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Apabila hal tersebut kita kaitkan dengan pembangunan Kelurahan, terutama Kepala Kelurahan harus berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan, sebagaimana diutarakan oleh C.S.T. Kansil, bahwa :

“Kepala Kelurahan sebagai orang pertama yang mengembang tugas dan kewajiban berat karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban”. (1983:23).

Mengingat fungsi Lurah dalam pembangunan adalah sangat menentukan sehingga calon terpilih seharusnya bukan hanya mendapat dukungan, akan tetapi merupakan juga seorang insan pembangunan dan modernisator. Seorang Kepala Kelurahan, di samping melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan, juga sebagai pembina masyarakat, maka ia harus seorang pancasilais yang mempunyai dedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab terhadap kepentingan dan kehendak rakyatnya, sehingga dengan demikian seorang Kepala Kelurahan akan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan yang menampung dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di Kelurahan, serta dapat membina hasil-hasil positif yang telah mereka dapat, menuju ke arah yang lebih sempurna dan lebih baik. Di samping itu harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada skema/kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 01

Skema di atas menunjukkan bahwa fungsi Lurah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang perdagangan, bidang perhubungan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang keagamaan dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan mentalis, kepemimpinan, kesadaran masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang merupakan hal yang paling menentukan keberhasilan pembangunan Kelurahan dan suksesnya pembangunan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe dan dasar penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif yang mana akan berusaha untuk memberikan dan menguraikan gambaran-gambaran yang akan diteliti untuk menjawab setup permasalahan dalam rumusan masalah berdasarkan data yang diperoleh.

Sedangkan dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus dengan maksud untuk lebih mengupayakan mengetahui secara mendalam dan menyeluruh akan masalah-masalah yang diteliti sebenar-benarnya sesuai data yang diperoleh.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan terhadap objek yang akan diteliti, dalam hal ini populasi yang diambil untuk penulisan skripsi ini adalah perangkat kelurahan ataupun orang yang dianggap perlu untuk dijadikan sebagai tempat pengambilan data.

b. Sampel

Cara penarikan sample pada penelitian dilakukan secara Purposive Sampling (sample sengaja) dengan maksud bahwa sample yang dipilih untuk menjadi responden tersebut mengetahui permasalahan dalam penelitian ini dapat mewakili yang lainnya.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kelurahan.

Sedangkan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Lingkungan = 2 orang
2. Kepala Urusan = 3 orang
3. Tokoh Masyarakat = 10 orang
4. Kepala Keluarga = 25 orang
- Jumlah = 40 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan penelitian ini, cara pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yakni suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dengan lokasi yang menjadi objek penelitian.
- b. Interview (wawancara) yakni salah satu teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan responden yang telah dipilih.
- c. Kuesioner (daftar pertanyaan) dimana penulis mengajukan pertanyaan kepada sejumlah responden yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui hasil wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui berbagai referensi yang berhubungan dengan peraturan yang dilakukan.

5. Analisis Data

Data diperoleh, diseleksi berdasarkan jenisnya kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi ini maka penulis menguraikan menjadi lima Bab yang terdiri dari sub bab-sub bab sebagai berikut :

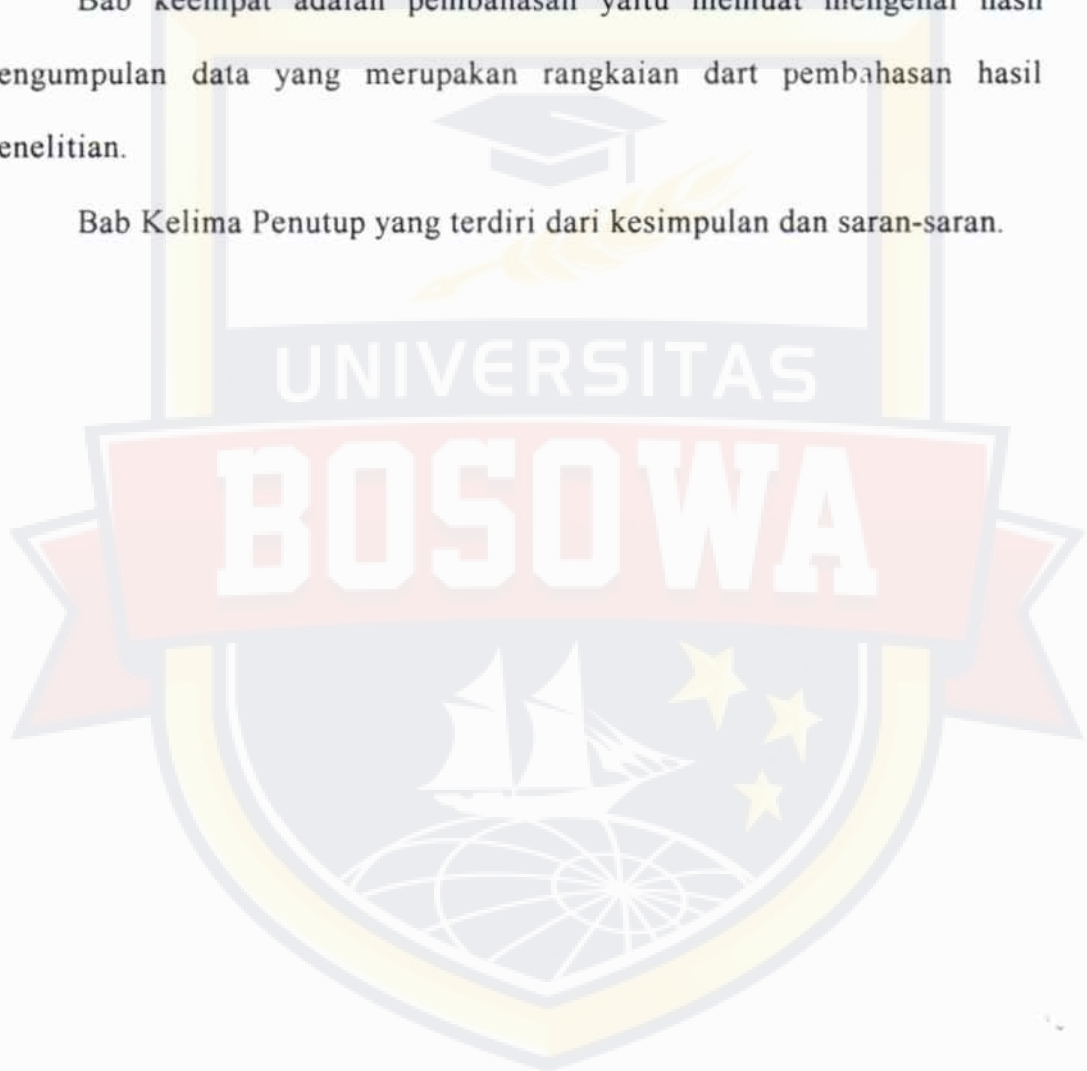
Bab Pertama, Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian fungsi, pengertian kepala Kelurahan, pengertian administrator, pengertian pembangunan, pengaruh kepemimpinan dalam pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan.

Bab Ketiga, Gambaran Umum Lokasi Penelitian yaitu memberikan gambaran tentang latar belakang sejarah terbentuknya Kelurahan Penrang, keadaan geografis dan demografis.

Bab keempat adalah pembahasan yaitu memuat mengenai hash pengumpulan data yang merupakan rangkaian dari pembahasan hasil penelitian.

Bab Kelima Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



Dengan demikian dalam hubungan dengan tinjauan organisasi yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dan masing-masing mempunyai tugas antara satu bagian dengan bagian yang lain terdapat satu keterkaitan yang secara bersama-sama menjalankan suatu fungsi sesuai dengan tujuan dari organisasi yang ingin dicapai, dan apabila salah satu bagian mengalami hambatan maka berpengaruh terhadap bagian yang lain, demikian selanjutnya.

Oleh karena itu bagi suatu organisasi, terutama organisasi pemerintahan yang mengembang fungsi pelayanan, untuk itu kerja sama antara unit kerja sangat besar pengaruhnya dalam menjaga keseimbangan fungsi yang diembannya.

Akan halnya dengan tugas kepala Kelurahan sebagai orang pertama yang mengembang tugas dan kewajibannya yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

B. Pengertian Kepala Kelurahan

Kepala Kelurahan sebagai orang pertama mengemban tugas dan mempunyai kewajiban yang berat yaitu sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Di samping itu kepala Kelurahan juga mempunyai fungsi sebagai penyelenggara dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan yang dijiwai azas usaha bersama dan kekeluargaan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Kepala Kelurahan yang tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 2001 sebagai berikut :

1. Kedudukan Kepala Kelurahan yaitu :
 - a. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
 - b. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Tugas Kepala Kelurahan yaitu :

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
3. Fungsi Kepala Kelurahan yaitu :
 - a. Menggerakkan partisipasi masyarakat.
 - b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
 - c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintah Kelurahan.
 - d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 - e. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan.
 - f. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

4. Kewenangan Kepala Kelurahan yaitu :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Dalam kedudukannya Kepala Kelurahan secara teoritis berkemampuan untuk melaksanakan usaha prakarsa dan bimbingan pemerintah dengan keinginan, kemampuan serta kondisi masyarakat setempat. Usaha tersebut dilakukan dengan jalan :

1. Menterjemahkan gagasan, nilai dan target dari luar oleh pemerintah agar dipahami oleh masyarakat, hal ini penting sebab pada umumnya instruksi gagasan dari pemerintahan berdasarkan pada kerangka referensi nasional dan rasional, sedangkan alam pemikiran masyarakat pada umumnya berdasarkan kerangka referensi tradisional dan lokal. Demikian juga sebaliknya Kepala Kelurahan menterjemahkan gagasan, nilai dan keinginan masyarakat Kelurahan sedemikian rupa, sehingga mudah dipahami oleh pemerintah.

2. Menawarkan berbagai gagasan, nilai dan target dalam berbagai alternatif, bakat masyarakat pada pemerintah maupun sebaliknya Kepala Kelurahan menawarkan alternatif untuk ditawarkan dan pihak bersangkutan memilih mana yang terbaik untuk kepentingan masing-masing dalam arti menerima dengan syarat menolak untuk mengajukan alternatif sendiri.
3. Menggunakan segala posisi yang ada padanya untuk mendukung pilihan yang dilakukan oleh masyarakat dan menggerakkan segala daya kepemimpinan agar aspirasi masyarakat yang dipimpinnya bisa terpenuhi.

Oleh karena itu Kepala Kelurahan harus bersikap sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Pasal 67 (perangkat desa) Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengemukakan :

1. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
2. Kepala Kelurahan disebut Lurah.
3. Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dari Walikota/Bupati atas usul Camat.
4. Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Camat.
5. Lurah bertanggung jawab kepada Camat.
6. Pembentukan kelurahan ditetapkan Peraturan Daerah (Perda).

Melihat konsepsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kelurahan adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah pendidikan yang mempunyai

organisasi pemerintahan langsung di bawah Camat dan Kepala Kelurahan adalah pelaksana jabatan, sebagai Kepala Kelurahan harus seorang pegawai negeri yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

C. Pengertian Administrator

Untuk mempelajari dan menjelaskan pengertian administrator maka penulis akan membagi sebagai berikut :

a. Pengertian administrator sebagai etimologi

Pengertian ini adalah menurut arti kata dan asal mula administrasi, menurut J. Wayong yang dikutip oleh Manulang dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pembangunan bahwa :

“Kata administrasi itu dari kata administration dalam bahasa Inggris, administer adalah kombinasi dari kata ad + dimister adalah latin. Pada mulanya berarti jasa bantuan, sejak masa kekuasaan Roma terletak pengertian pelayanan (*to serve*) misalnya pelayanan masih dalam arti menjalankan mesin, kemudian timbul pengertian pemberian pimpinan (*to manage* atau *to direct*) dengan variasi penguasa pengendalian pemecahan”. (1967:45).

Dalam pengertian secara etimologi tersebut di atas ada perubahan arti dari pada pelayanan menjadi pembinaan.

b. Pengertian administrasi secara sempit berasal dari bahasa

Berasal dari bahasa Belanda yaitu administrasie berarti tata usaha dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi yang dikemukakan oleh para sarjana sebagai berikut :

Menurut Paul Mahien yang diterjemahkan oleh The Liang Gie, dalam bukunya yang berjudul Kamus Administrasi menjelaskan sebagai berikut :

“Pengertian administrasi dapat dirumuskan sebagai pencatatan keterangan-keterangan secara tertulis kelak dapat dipergunakan”. (1976:34).

Pengertian demikian itu lebih populer dengan istilah tata usaha, selanjutnya menurut pendapat Soekarno K dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Manajemen, maka tata usaha dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Tata usaha adalah segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan dan sebagainya”. (1967:14).

Pada rumusan ini nampaknya kegiatan yang mana merupakan tata usaha diperumpamakan bukan hanya tulis menulis saja akan tetapi termasuk dengan cara penyimpanan atau kearsipan namun demikian pengertian hampir sama dengan rumusan yang pertama.

Tata usaha dapat pula diartikan dengan pendapat George R. Terry yang diterjemahkan oleh The Liang Gie dalam bukunya berjudul Administrasi Perkantoran Modern, bahwa :

“Pekerjaan kantor meliputi penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat tulisan sebagai cara untuk meringkas banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontrol bagi pemimpin”. (1978:17).

Rumusan penulisan di atas kemungkinan dalam arti serada mengenai adanya gambaran pengertian administrasi sempit, dan di Indonesia dikenal sebagai istilah tata usaha.

c. Pengertian administrasi secara luas

Setelah jaman penjajahan Belanda di Indonesia pengertian administrasi semakin berkembang dengan pesatnya dan para sarjana mulai mempelajarinya secara khusus. Buku-buku administrasi dari Eropa menjadi bahan perbandingan dari pada pendapat para sarjana tersebut, berkembang terus menerus dan meningkat terus menerus dalam urusan tulis menulis atau tata usaha akan tetapi merupakan keseluruhan proses kerja sama dari kelompok orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Memang ada yang khusus dapat dikerjakan sendiri tapi hampir seluruh kegiatan manusia harus dikerjakan secara bersama-sama. The Liang Gie dalam bukunya berjudul Administrasi Perkantoran Modern menjelaskan sebagai berikut :

“Administrasi adalah segala proses penyelenggaraan usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu”. (1967:15).

Untuk memperjelas pengertian tersebut maka berikut akan dikemukakan pendapat Manulang sebagai berikut :

“Administrasi dalam arti luas dapat kita soroti dari tiga segi yaitu institusional, fungsional dan proses kegiatan ke arah tercapainya tujuan bersama, sedangkan dalam arti fungsional adalah segala kegiatan ke arah tercapainya suatu tujuan administrasi dalam arti proses adalah segala kegiatan sejak dari perumusan tujuan sampai adanya penyelenggaraan sehingga tercapai suatu tujuan”. (1977:26).

Jadi pendapat dari Manulang ini dibandingkan dengan pendapat-pendapat terdahulu pada prinsipnya adalah sama, dalam hal ini ciri dari administrasi tersebut bahwa adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan itu mempunyai jangka waktu tertentu yang diketahui awalnya, sedangkan berakhirnya belum diketahui, ini yang disebut dengan proses.

Selanjutnya berbicara tentang pengertian administrasi dalam arti luas itu tidak dapat dipisahkan dari organisasi dan manajemen, karena administrasi dan manajemen satu sama lain saling berkaitan, administrasi menentukan dari pada organisasi sebagai wadah, dengan demikian antara organisasi, administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

D. Pengertian Pembangunan

Dalam hal memberikan pengertian pembangunan masih sering dicampur antara kata pembangunan, pembinaan dan pengembangan. Istilah pembinaan dan pengembangan biasa untuk mengatakan sesuatu yang sudah ada untuk ditingkatkan sedangkan istilah pembangunan biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang belum ada menjadi ada atau dapat pula sesuatu yang sudah ada untuk ditingkatkan.

Selanjutnya telah banyak para sarjana yang mengemukakan pendapatnya yang menyangkut pengertian pembangunan. Pendapat Bintoro Tjokroamidjoyo dalam buku Pengantar Administrasi pembangunan menyatakan bahwa :

“Pembangunan adalah suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang lebih baik”. (1990:6).

Selanjutnya Komaruddin dalam bukunya Pengantar untuk Memahami Pembangunan, memberikan pengertian sebagai berikut :

“Proses perubahan sosial yang dengan perubahan sosial itu nilai, sikap dan pranata lama diganti oleh sikap pranata baru tanpa mempertimbangkan sejauhmana perubahan-perubahan itu mencerminkan harapan sebagian besar rakyat yang bersangkutan”.(1985 :24)

Melihat dari kedua definisi tersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan dan pertumbuhan sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, menuju kepada suatu masyarakat sejahtera yang di cita-citakan. Kalau dilihat pengertian tersebut maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni :

- a. Bahwa pembangunan merupakan suatu proses, berarti kalau kegiatan yang terus menerus dilaksanakan meskipun sudah barang tentu dapat dibagi-bagi menjadi tahap-tahap tertentu yang dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu yang diharapkan dapat diperoleh.
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha sadar yang dilaksanakan suatu bangsa, negara dan pemerintah.
- c. Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana yang berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- d. Pembangunan mengarah kepada moderentitas dalam arti cara hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya.

- e. Bahwa pembangunan adalah yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa yang meliputi ideologi, politik, sosial budaya.
- f. Semua hal tersebut di atas hendaknya ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa dan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian maka pada hakekatnya pembangunan adalah usaha yang ditujukan pada perubahan, peningkatan dan pertumbuhan jalan, gedung dan prasarana fisik lainnya. Sedangkan pembangunan spritual dalam arti pembinaan ketentraman kesadaran masyarakat yang ada pada akhirnya menuju pada cita-cita bangsa.

E. Pengaruh Kepemimpinan dalam Pemerintahan dan Pembangunan di kelurahan.

Pada dasarnya diseluruh pelosok tanah air sebagian terdiri dari daerah pedesaan dan kelurahan, oleh karena itu pembangunan kelurahan sangat tergantung pada usaha-usaha mendinamiskan masyarakat khususnya Kelurahan, sedangkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana maupun tenaga ahli untuk melancarkan usaha-usaha tersebut diperlukan pemikiran lebih jauh yaitu dengan cara-cara untuk membawa masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kelurahan. Perwujudan pembangunan memerlukan dukungan dari pemimpin-pemimpin yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh yang kuat melalui kepercayaan masyarakat daerahnya.

Pelaksanaan pembangunan di Kelurahan sangat tergantung pada kemampuan dan kreatifitas kepada Kelurahan dan menjalankan tugas fungsinya sebagai pemerintah teristimewa dalam membina masyarakat agar tetap terjalin kerja sama antara Kepala kelurahan dan masyarakat.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tentang tanggung jawab untuk pembangunan kelurahan terutama terletak di atas pundak Kepala Kelurahan bahwa mereka merupakan suatu faktor yang menentukan pembangunan Kelurahan secara menyeluruh.

Faktor pertama Kepala Kelurahan mempunyai wewenang yang betul-betul yaitu dimana Kepala Kelurahan merupakan pimpinan tertinggi didaerahnya mentaati dan menanti bimbingan dari Kepala Kelurahan itu sendiri yang mencerminkan hubungan antara Kepala Kelurahan dan masyarakat.

Faktor kedua Kepala Kelurahan mempunyai posisi yang kuat sebagai wakil dari pemerintah yang ada di daerah Kelurahan, peranannya sebagai wakil pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah sekaligus melaksanakan pembangunan di daerah perkotaan.

Beberapa mekanisme lain yang lebih memperkuat Kepala Kelurahan sebagai pemerintah didaerahnya yakni adanya SK pengangkatan dari pemerintah tingkat II dalam hal ini Walikotaamadya. Akhirnya Kepala Kelurahan bertanggung jawab langsung pada Walikotaamadya daerah tingkat II melalui Kepala Wilayah Kecamatan.

Dengan demikian pengaruh kepemimpinan dalam pemerintah dan pembangunan di Kelurahan penting mendapatkan kejelasan seperti UU yang bertujuan untuk tidak terbatas saja mengadakan setiap tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan mencakup tentang pentingnya untuk menyelesaikan pembangunan di segala bidang yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Sejalan dengan itu maka perlu memperkuat suatu landasan bagi pemerintah dan pembangunan, khususnya pembangunan daerah Kelurahan agar semakin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya guna pelaksanaan dari pada pemerintah dan pembangunan di Kelurahan yang semakin meluas harus dilaksanakan secara efisien dan efektif. Sehubungan dengan yang telah digariskan dalam GBHN tersebut, maka sudah saatnya kepemimpinan di daerah Kelurahan dapat mempengaruhi ke arah peningkatan kehidupan masyarakat Kelurahan yang semakin layak. Dalam hal ini sebagai aparat pelaksana pembangunan. Dengan kata lain kepemimpinan pada semua tingkat pemerintahan merupakan posisi yang sangat menentukan dalam usaha mewujudkan pembangunan nasional.

Begitu pula dengan Kepala Kelurahan yang merupakan Kepala pemerintahan yang memimpin wilayah Kelurahan, dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin masyarakat harus mempunyai kelebihan tertentu agar dapat membina dan memotivasi masyarakat agar tercipta kerja sama yang serasi dan harmonis dalam kegiatan pembangunan Kelurahan. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka seorang Kepala Kelurahan

haruslah seorang pemimpin yang memiliki jiwa Pancasila, memiliki wibawa dan daya upaya untuk memimpin masyarakat ke dalam kesadaran kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagai tindak lanjut dari kepemimpinan itu, maka W. Widjaja berpendapat bahwa :

“Seorang pemimpin harus lewat sikap dan perbuatannya menjadikan dirinya pola panutan dari orang-orang yang dipimpinnya, dan seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan kreasi pada orang yang dipimpinnya, agar berani berjalan dan sanggup bertanggung jawab”.(1986:7).



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kelurahan Penrang

Pada tahun 1982, Kelurahan Penrang masih dengan nama Kelurahan Persiapan Penrang, dan pada tahun 1994, sudah masuk kelurahan Difinitif Penrang yang berarti Pinra (berubah-ubah akhirnya di beri nama Penrang), Kelurahan Penrang berada pada pusat perkotaan.

Kepala Kelurahan Penrang pada saat itu Andi Kamal dari tahun 1993-1999 dan Oktober 1999 dipimpin oleh Abdul Rahman sampai sekarang

B. Geografi dan Demografi

1. Geografi

a. Letak dan Batas Wilayah

Letak Kelurahan Penrang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang, sedangkan wilayah Kelurahan Penrang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kelurahan Pacongan
- Sebelah Selatan Kelurahan Jaya
- Sebelah Barat Kelurahan Salo
- Sebelah Timur Kelurahan Sawitto

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Kelurahan Penrang terdiri dari 10 RW dan 20 RT dan mempunyai 2 lingkungan dengan lusa keseluruhan wilayah 237 Km, dengan perincian tanah sebagai berikut :

Tabel 1.
Luas Tanah Menurut Kegunaannya Di Kelurahan Penrang Tahun 2002

| No. | Penggunaan | Luas (Ha) |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. | Pemukiman | |
| | a. Pemukiman KPR BTN | 2 ha |
| | b. Pemukiman umum | 90,5 ha |
| | c. Dan lain-lain | 114,8 ha |
| 2. | Untuk bangunan | |
| | a. Perkantoran | 10 ha |
| | b. Sekolah | 4 ha |
| | c. Pertokoan | 12 ha |
| | d. Pasar | 2 ha |
| | e. Tempat peribadatan | 1,3 ha |
| | f. Makam | 0,05 ha |
| 3. | Rekreasi dan Olahraga | |
| | a. Taman | 0,1 ha |
| | b. Lapangan sepak bola | 0,1 ha |
| 4. | Industri besar/sedang/kecil | 0,15 ha |
| Jumlah luas seluruhnya | | 237 ha |

Sumber data sekunder : Kantor Lurah Penrang, 2002

c. Keadaan Alam dan Iklim

Suhu pada siang hari 31-33 °C di atas permukaan air laut 3 m dengan curah hujan rata-rata setiap tahunnya mencapai 32 °C.

2. Demografi

a. Penduduk

Penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan Penrang berjumlah 9.567 jiwa dengan jumlah Kelurahan 2.130 KK, hal ini bila dirata-ratakan setiap kepala keluarga menanggung beban hidup sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelas mengenai keadaan penduduk menurut tingkat umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.
Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Di Kelurahan Penrang Tahun 2002

| No. | Tingkat Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | L | P | |
| 1. | 0 – 12 bulan | 97 | 104 | 201 |
| 2. | 13 bulan – 4 tahun | 275 | 229 | 503 |
| 3. | 5 – 6 tahun | 156 | 192 | 246 |
| 4. | 7 – 12 tahun | 380 | 440 | 820 |
| 5. | 13 – 15 tahun | 301 | 312 | 623 |
| 6. | 16 – 18 tahun | 118 | 166 | 284 |
| 7. | 19 – 25 tahun | 532 | 695 | 1.227 |
| 8. | 26 – 35 tahun | 1.415 | 1.528 | 2.943 |
| 9. | 36 – 45 tahun | 869 | 824 | 1.693 |
| 10. | 46 – 50 tahun | 343 | 377 | 720 |
| 11. | 51 – 60 tahun | 35 | 70 | 105 |
| 12. | 61 – 75 tahun | 22 | 13 | 35 |
| 13. | Lebih dari 75 tahun | 33 | 46 | 79 |
| Jumlah | | 4.569 | 5.000 | 9.569 |

Sumber : Buku profil Kelurahan Penrang, 2002

Melihat data kualitatif di atas tentang keadaan penduduk menurut tingkat umur tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa antara 15-64 tahun adalah penduduk yang termasuk usia produktif, dan 0-14 serta 65 tahun ke atas termasuk jumlah penduduk non produktif.

Berdasarkan prosentasenya keadaan penduduk Kelurahan Penrang tersebut, maka usia produktif lebih tinggi maka dengan demikian sangat menguntungkan bagi wilayah Kelurahan Penrang, karena merupakan tenaga potensial, yang dibutuhkan dalam pembangunan.

b. Mata Pencaharian

Sebagian besar wilayah Kelurahan Penrang terletak pada pusat perkotaan, sehingga mayoritas penduduk adalah pedagang dan sebagian juga Pegawai Negeri Sipil, swasta dan ABRI. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian penduduk Kelurahan Penrang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Di Kelurahan Penrang Tahun 2002**

| No. | Pekerjaan Pokok | Jumlah (Org) | % |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1. | Petani | 796 | 11,36 |
| 2. | Peternak | 475 | 6,77 |
| 3. | Pedagang | 2.260 | 32,25 |
| 4. | Pegawai Negeri Sipil | 1.186 | 16,92 |
| 5. | ABRI | 70 | 0,99 |
| 6. | Pegawai swasta | 200 | 2,85 |
| 7. | Jasa angkutan | 900 | 12,84 |
| 8. | Jasa keterampilan | 1.120 | 15,98 |
| Jumlah | | 7.007 | 100,00 |

Sumber : Buku profil Kelurahan Penrang, 2000

c. Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan adalah factor yang tidak kalah pentingnya, khususnya bagi bangsa Indonesia yang mana dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 dimana diamanatkan tugas pemerintah yang sekaligus merupakan tugas negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam wilayah Kelurahan Penrang yang menyangkut pendidikan dapatlah dikatakan telah mengalami kemajuan sebab telah tersedia beberapa gedung-gedung sekolah. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperlihatkan dengan sungguh-sungguh peningkatan dan pengembangan pendidikan, karena masalah pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam pembangunan dewasa ini.

Mengenai perkembangan tingkat pendidikan di Kelurahan Penrang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan di Kelurahan Penrang
Tahun 2002

| No. | Pendidikan | Jumlah (Org) |
|---------------|------------------------|--------------|
| 1. | Buta aksara | 250 |
| 2. | Tidak tamat SD | 1.708 |
| 3. | Tamat SD | 3.156 |
| 4. | Tamat SLTP | 2.508 |
| 5. | Tamat SLTA | 1.725 |
| 6. | Tamat Akademik (D1-D3) | 215 |
| 7. | Sarjana | 107 |
| Jumlah | | 9.569 |

Sumber : Buku profil Kelurahan Penrang, 2002

d. Agama

Sebagian besar penduduk Kelurahan Penrang merupakan penduduk asli daerah setempat, sehingga mayoritas penduduknya beragama Islam, dan selebihnya merupakan pendatang yang menganut agama Kristen Katholik, Kristen Protestan, Budha, dan Hindu.

Mengenai agama yang dianut oleh penduduk Kelurahan Penrang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.
Komposisi Penduduk Menurut Agama
Di Kelurahan Penrang Tahun 2002

| No. | A g a m a | Jumlah Penganut |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Islam | 9.425 |
| 2. | Kristen Protestan | 85 |
| 3. | Kristen Katholik | 31 |
| 4. | Budha | 17 |
| 5. | Hindu | 11 |
| Jumlah | | 9.569 |

Sumber : Buku profil Kelurahan Penrang, 2002

C. Struktur Organisasi di Kelurahan Penrang

Organisasi pemerintahan disusun dengan berpedoman pada SK Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang “Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan”, sebagai berikut :

1. Kepala Kelurahan

Di samping mewakili pemerintah pusat, di dalam lingkungan masyarakat Kelurahan sebagai Pamong Kelurahan dan juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayahnya juga berfungsi dalam merencanakan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan pemerintahan di kelurahan, selain dari pada itu kepala Kelurahan harus pula melaksanakan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara keamanan dan ketertiban.

2. Sekretaris Kelurahan

Membantu melancarkan pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan, dalam hal ini memimpin sekretaris Kelurahan serta menjalankan administrasi pemerintahan kelurahan dan memberikan pelayanan staf kepada kepala Kelurahan dan melaksanakan tugas dan fungsi Kelurahan apabila sedang berhalangan.

3. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris kelurahan dalam tugasnya adalah mengurus kegiatan pemerintahan; urusan pembangunan, urusan perekonomian rakyat, urusan keuangan, serta urusan umum. Kepala Urusan (Kaur) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris Kelurahan.

4. Kepala Lingkungan

Lingkungan merupakan bagian dari suatu kelurahan, untuk itulah Kepala Lingkungan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana dalam menjalankan tugas dari Kepala Kelurahan dengan wilayah kerja yang telah digariskan.

Mengingat bahwa fungsi pemerintahan kelurahan ini merupakan terdepan dari struktur pemerintahan atau sebagai mata rantai yang paling bawah dalam keseluruhan hubungan pemerintah dengan rakyatnya, maka ketertiban dan pembinaan penyelenggara administrasi pemerintahan kelurahan sangat bermanfaat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Lurah Penrang Menjalankan Fungsinya sebagai Administrator Pembangunan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat.

Dalam rangka upaya pelaksanaan pembangunan nasional menyeluruh dan berkesinambungan pada berbagai aspeknya, baik di Kota maupun di Kelurahan, tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu sumber daya yang potensial apabila dikerahkan dan dimanfaatkan dengan sebaiknya sesuai dengan kemampuan, dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan kelurahan pada dasarnya adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam hal ini memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat bukan saja sebagai objek tetapi dituntut untuk ikut serta secara aktif sebagai subjek.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Lurah sebagai administrator pembangunan mengadakan pendekatan dan turun langsung ke lapangan bila ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dengan jalan ini masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan fungsi Lurah dalam membangkitkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat cukup berpengaruh

terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Penrang, hal ini dapat dilihat dari berbagai bidang seperti :

a. Pembangunan di bidang perdagangan

Pembangunan di bidang perdagangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin kepentingan konsumen, meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan lebih meratakan kesempatan kerja.

Untuk itu diperlukan penyebaran informasi pasar yang lebih merata dan usaha penyederhanaan tata niaga termasuk perizinan usaha perdagangan serta penyempurnaan lembaga perdagangan dan pemasaran, sehingga lalu lintas perdagangan dapat berlangsung lebih lancar serta dapat mendorong, persaingan sehat dan meningkatkan daya saing dipasar dunia.

Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di Kelurahan Penrang terdiri atas toko/kios yang berjumlah 1.650, dari jumlah penduduk yang berusaha di bidang perdagangan yang berjumlah 2.260. Perlu juga jelaskan bahwa pusat perdagangan dan pertokoan bukan saja di Kelurahan Penrang tetapi juga berada di kelurahan tetangganya yaitu Kelurahan Jaya, jadi dalam hal ini penduduk kelurahan Penrang yang tidak mempunyai toko di Kelurahan Penrang ternyata mereka mempunyai toko di Kelurahan Jaya yang cuma dibatasi oleh jalan raya saja.

Tabel 6.

Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Perdagangan Di Kelurahan Penrang Tahun 2002

| No. | Tanggapan Responden | Jumlah | % |
|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| 1. | Sangat Baik | 25 | 62,5 |
| 2. | Baik | 10 | 25 |
| 3. | Cukup Baik | 5 | 12,5 |
| 4. | Tidak Baik | - | - |
| Jumlah | | 40 | 100,00 |

Sumber data : Hasil olahan kuesioner, 2000/2003

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perdagangan adalah sangat baik 62,5 %, responden yang menyatakan baik 23 %, responden yang menyatakan cukup baik 12,5 %, sedang yang menyatakan tidak baik adalah tidak ada.

Dari keseluruhan responden dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bidang perdagangan adalah baik, karena rata-rata penduduk Kelurahan Penrang adalah pedagang.

b. Pembangunan di bidang perhubungan

Prasarana perhubungan merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan dalam rangka pembangunan di Kelurahan, artinya prasarana perhubungan mutlak perlu dibangun mengingat bidang ini akan merupakan arus lalu lintas, baik dalam rangka distribusi hasil produksi dan komunikasi maupun kelancaran bidang social ekonomi secara umum.

Dalam bidang perhubungan fungsi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu dengan jalan mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah seperti jalan raya, jembatan, setiap hari minggu diadakan pembersihan jalan, gorong-gorong, lorong-lorong, dalam pembersihan ini Lurah juga memberi pengarahannya kepada masyarakat agar jangan ngebut dijalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Penrang bahwa pembangunan bidang perhubungan di Kelurahan Penrang bahwa dari tahun ke tahun semakin meningkat, untuk tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2000/2002 di Kelurahan Penrang berhasil dirintis jalan bane sepanjang 10 km dan sebagian jalan tersebut sementara diaspal.

Untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan bidang perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.

Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Perhubungan Di Kelurahan Penrang Tahun 2002

| No. | Tanggapan Responden | Jumlah | % |
|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| 1. | Sangat Baik | 15 | 37,5 |
| 2. | Baik | 10 | 25 |
| 3. | Cukup Baik | 10 | 25 |
| 4. | Tidak Baik | 5 | 12,5 |
| Jumlah | | 40 | 100,00 |

Sumber data : Hasil olahan kuesioner, 2000/2003

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan, responden yang menyatakan sangat baik adalah 37,5%, responden yang menyatakan tidak baik adalah 25%, yang menyatakan cukup baik adalah 25%, yang menyatakan tidak baik adalah 12,5%.

Dari keseluruhan responden dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan adalah baik.

c. **Pembangunan di bidang kesehatan**

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk keadaan gizi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas tarap hidup kecerdasan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Pembangunan kesehatan dilakukan dengan memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga serta pencegahan penyakit, disamping upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Sejalan dengan itu di Kelurahan Penrang pemerintah telah mengadakan pembangunan prasarana kesehatan dan keluarga berencana yang meliputi Posyandu dan klinik KB.

Penempatan tenaga kesehatan di Kelurahan Penrang sesuai dengan data yang diperoleh adalah berjumlah 23 orang yang terdiri dari 6 orang dokter, 10 orang bidan dan mantri kesehatan sebanyak 4 orang, selain itu di Kelurahan Penrang juga terdapat 3 orang dukun bayi.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8.

Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Kesehatan Di Kelurahan Penrang Tahun 2002

| No. | Tanggapan Responden | Jumlah | % |
|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| 1. | Sangat Baik | 10 | 25 |
| 2. | Baik | 5 | 12,5 |
| 3. | Cukup Baik | 15 | 37,5 |
| 4. | Tidak Baik | 10 | 25 |
| Jumlah | | 40 | 100,00 |

Sumber data : Hasil olahan kuesioner, 2000/2003

Dari table tersebut diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan adalah responden yang menyatakan sangat baik adalah 25%, responden yang menyatakan baik adalah 12,5%, cukup baik 37,5%, responden yang menyatakan tidak baik adalah 25%.

Dari keseluruhan responden dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan adalah baik.

d. Pembangunan bidang pendidikan

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,

berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Pembangunan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan semangat belajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Sejalan dengan itu tujuan nasional tersebut di atas di Kelurahan Penrang telah dibangun sarana dan prasarana pendidikan seperti terdapatnya 2 buah Taman Kanak-Kanak (TK), 4 buah Sekolah Dasar (SD) Negeri, 1 buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri (1 buah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri.

Dengan demikian faktor penunjang ini sangat memberikan arti dalam memajukan kecerdasan masyarakat Kelurahan Penrang sehingga akan memberikan pengaruh kepada peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Penrang.

Untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9.

**Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat
Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Pendidikan
Di Kelurahan Penrang Tahun 2002**

| No. | Tanggapan Responden | Jumlah | % |
|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| 1. | Sangat Baik | 10 | 25 |
| 2. | Baik | 5 | 12,5 |
| 3. | Cukup Baik | 15 | 37,5 |
| 4. | Tidak Baik | 10 | 25 |
| Jumlah | | 40 | 100,00 |

Sumber data : Hasil olahan kuesioner, 2000/2003

Dari tabel tersebut diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan adalah responden yang mengatakan sangat baik adalah 25%, responden yang menyatakan baik adalah 12,5%, cukup baik 37,5%, responden yang menyatakan tidak baik adalah 25%.

Dari keseluruhan responden dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan adalah baik.

e. Pembangunan di bidang keagamaan

Pembangunan bidang keagamaan seperti pada bidang-bidang lainnya didasarkan atas landasan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan dalam GBHN.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah dengan memiliki keselarasan, keserasian, ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia menghendaki adanya hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya dan adanya keselarasan antara cita-cita hidup dan mengejar kebahagiaan di akhirat kelak.

Menurut data yang penulis peroleh bahwa di Kelurahan Penrang pada tahun 1993/2002 telah membangun Musholah di BTN Tasokoe, tepatnya di lingkungan Baru dan merenovasi 2 buah Mesjid di lingkungan Kajao yaitu Mesjid Raya dan Mesjid Rahma yang berada di pusat perkotaan, sedangkan sumber dana diperoleh dari pemerintah daerah dan swadaya masyarakat.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang keagamaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.

Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Keagamaan Di Kelurahan Penrang Tahun 2002

| No. | Tanggapan Responden | Jumlah | % |
|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| 1. | Sangat Baik | 15 | 37,5 |
| 2. | Baik | 10 | 25 |
| 3. | Cukup Baik | 15 | 37,5 |
| 4. | Tidak Baik | - | - |
| Jumlah | | 40 | 100,00 |

Sumber data : Hasil olahan kuesioner, 2000/2003

Dari tabel tersebut diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan adalah responden yang menyatakan sangat baik 37,5%, responden yang menyatakan baik 25%, responden yang menyatakan cukup baik adalah 37,5%, responden yang menyatakan tidak baik adalah tidak ada.

Hal ini diketahui dari seringnya direnovasi Mesjid, ini berkat partisipasi masyarakat yang memberikan sumbangan baik itu buah pikiran/pendapat, tenaga dan harta benda sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Lurah Penrang dalam melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan.

Untuk lengkapnya penulisan skripsi ini, maka penulis berupaya untuk mengemukakan atau memaparkan masalah yang dihadapi oleh Lurah Penrang sebagai penanggung jawab di Kelurahan Penrang.

1. Faktor Pendidikan dan Mentalis

Berhasil tidaknya pembangunan di Kelurahan sangat tergantung kepada Kelurahan, dimana Kepala Kelurahan dituntut peranannya baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana pembangunan.

Dari semua ini apabila dikaji secara mendalam maka tidak terlepas dari persoalan pendidikan Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

Penulis mengartikan pendidikan sebagai kapasitas berfikir sebagaimana diketahui bahwa Kepala Kelurahan merupakan *central*

authority yang berfungsi sebagai administrator pembangunan, dengan fungsi tersebut maka kepala Kelurahan harus dapat menunjukkan kemampuannya atas dasar pendidikan, keterampilan, dan kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan, oleh karena itu kemampuan tersebut mempengaruhi masyarakat keseluruhan.

Dengan pendidikan yang dimaksud di atas baik secara formal ataupun secara informal yang diperoleh kepala kelurahan tentunya membawa pengaruh dan positif terhadap perkembangan pembangunan kelurahan.

Tanpa pendidikan dan latihan menurut penulis, Kepala Kelurahan sulit untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan.

Demikian juga mengenai mentalitas kepala kelurahan sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya pembangunan Kelurahan, apabila Kepala Kelurahan memiliki mental yang baik artinya sejalan dengan norma-norma yang dihadapi perkembangan didalam masyarakat, maka tentunya pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Semua disebabkan oleh karena kepala kelurahan merupakan pemimpin dan pelopor pembangunan di Kelurahan sendiri, Kepala Kelurahan harus menjadi panutan masyarakat sehingga semua tindakan dan prilaku dari kepala kelurahan dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

2. Faktor Kepemimpinan/Segi Pemerintahan

Maju mundurnya pembangunan Kelurahan pada dasarnya terletak pada bagaimana cara seorang pemimpin dalam menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan disamping adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang terlaksananya pembangunan kelurahan tersebut. Dalam hal ini maka masalah kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dan dihayati oleh seorang kepala kelurahan dalam rangka pembangunan Kelurahan.

Kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang ada. Sukses atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan adalah sangat tergantung kemampuan para pemimpin sehingga penggunaannya berjalan efisien, ekonomis, efektif.

Selanjutnya berbicara mengenai kepemimpinan tentunya tidak terlepas dari masalah kewibawaan, oleh karena itu untuk dapat menggerakkan orang lain, harus bekerja sama dengan pemimpinnya maka si pemimpin dapat menggunakan kewibawaannya.

Kewibawaan adalah sifat atau ciri-ciri dari komunikasi (perintah) dalam suatu organisasi formal, yang menyebabkan mereka diterima oleh seorang anggota organisasi.

Perlu pula dijelaskan bahwa administrator sebagai pemimpin dalam birokrasi digambarkan sebagai pemimpin yang kurang bersifat kharismatik dan lebih menggunakan keahlian profesionalisme serta

berbagai teknik manajemen yang diinginkan dalam memimpin, juga ada proses birokrasi dan kepemimpinan yang mempunyai sifat alamiah, seperti pemikiran orisinal revolusioner, menentang tradisi dan melepaskan diri dari aturan lembaga yang sudah rutin dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang dikaitkan kekuasaan formal atau hak untuk bertindak atau untuk menuntut tindakan orang lain, kewenangan disini didasarkan kewenangan formal untuk melaksanakan kepemimpinan.

Dalam prakteknya kewibawaan dan kewenangan sulit dipisahkan karena, kepemimpinan harus memiliki keduanya yaitu dasar hukum (legalisasi), yang memberikan hak padanya untuk memimpin dan kemampuan untuk diterima kepemimpinannya. Tapi akhir-akhir ini kecenderungan kepemimpinan itu dilaksanakan.

Namun masyarakat beraneka ragam bentuk dan kebudayaan yang membutuhkan teknik kepemimpinan yang bervariasi pula, ada kelompok masyarakat yang membutuhkan teknik kepemimpinan yang tinggi, ada kelompok masyarakat yang membutuhkan kekerasan, arrasi, demokrasi dan sebagainya, akan tetapi masyarakat yang ada di Kelurahan Penrang pada umumnya menyukai dan senang pada kepemimpinan dengan cara persuasive atau mengajak ikut serta masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada didaerahnya.

Dalam prakteknya kewibawaan dan kewenangan sulit dipisahkan karena, kepemimpinan harus memiliki keduanya yaitu dasar hukum

(legalisasi), yang memberikan hak padanya untuk memimpin dan kemampuan untuk diterima kepemimpinannya. Tapi akhir-akhir ini kecenderungan kepemimpinan itu dilaksanakan.

3. Faktor Kesadaran Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Penrang walaupun telah memberikan partisipasinya dengan baik namun disisi lain mereka belum menyadari pentingnya pembangunan itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan Kelurahan pada dasarnya adalah suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hal ini memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat bukan saja sebagai objek tetapi dituntut untuk ikut serta secara aktif sebagai subjek.

Masyarakat sebagai objek pembangun, berarti masyarakat menjadi sasaran dalam pembangunan, sehingga lebih bersifat pasif, sedangkan sebagai subjek berarti masyarakat diharapkan ikut serta secara baik sebagai perencana, pelaksana, juga ikut bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan.

Dalam hubungan ini administrator mempunyai peranan yang penting untuk memberikan penerangan dan penjelasan akan arti pentingnya pembangunan masyarakat, karena ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan untuk meningkatkan taraf hidupnya, maka masyarakat sangat apatis menyukseskan pembangunan dikelurahannya.

Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa tenaga, uang material, sumbangan pikiran yang digunakan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta kesediaannya menerima petunjuk-petunjuk dan anjuran-anjuran pemerintah.

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala Kelurahan Penrang diperoleh keterangan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kelurahan karena aparat pelaksana kurang dapat menjelaskan tujuan dari pembangunan tersebut, demikian juga masyarakat biasanya lambat, untuk menerima pembaharuan-pembaharuan oleh karena masyarakat terlebih dahulu ingin melihat hasil-hasil dari pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembangunan sehingga hal ini memerlukan pemecahan yang sungguh-sungguh.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan penulis dengan tokoh masyarakat mengatakan karena pada umumnya masyarakat Kelurahan Penrang berusaha dalam bidang perdagangan yang pagi-pagi sudah meninggalkan rumah dan pada malam hari belum kembali kerumah, sehingga otomatis kegiatan pembangunan dalam kelurahan mereka kurang diperhatikan. Dalam hal ini mereka belum menyadari akan pentingnya pembangunan itu sendiri karena selalu disibukkan oleh pekerjaan mereka sebagai pedagang.

4. Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Berdasarkan hasil yang penulis dapat dari wawancara dengan Kepala Kelurahan Penrang, tingkat pendidikan masih rendah. Rata-rata Cuma mengenyam pendidikan dasar sehingga otomatis mereka tidak memahami hakekat dari pembangunan itu sendiri.

Dari hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat di Kelurahan Penrang, mereka mengatakan bahwa setelah selesai menamatkan pendidikan disekolah dasar mereka langsung bekerja sebagai pedagang, hal ini memungkinkan karena Kelurahan Penrang merupakan pusat perdagangan, disamping mereka mewarisi pekerjaan orang tua mereka.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh kepala kelurahan, masyarakat di Kelurahan Penrang rata-rata kawin muda dan mempunyai anak yang banyak sehingga dipastikan program Keluarga Berencana tidak berhasil padahal mereka sudah diarahkan tentang pentingnya Keluarga Berencana itu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, maka dapat penulis simpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dengan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Lurah Penrang dalam membangkitkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat cukup berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan di bidang perdagangan, bidang perhubungan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang keagamaan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan Kepala Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor pendidikan dan mentalitas, faktor kepemimpinan, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

B. Saran-saran

Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap fungsi Lurah sebagai administrator pembangunan di Kelurahan Penrang, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi keberhasilan pelaksanaan fungsi Lurah tersebut yaitu :

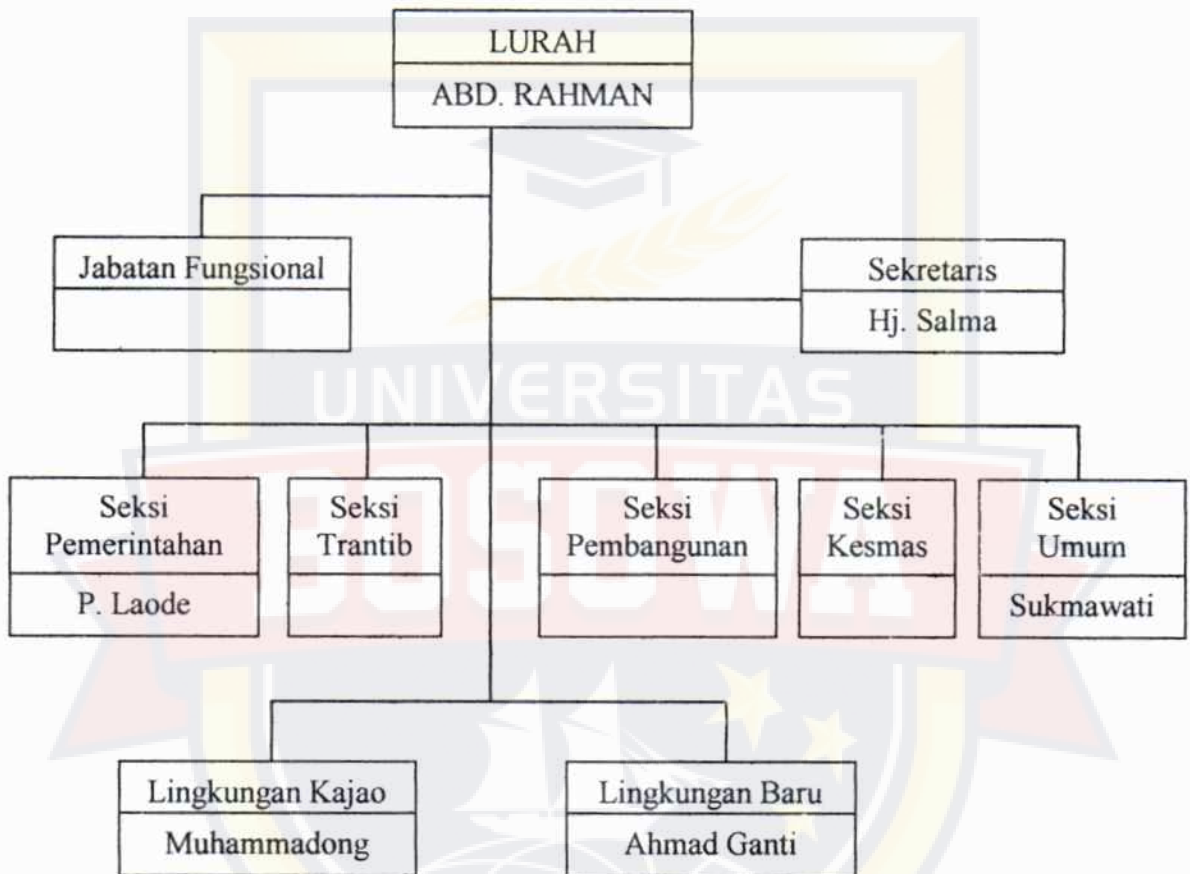
1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, maka diharapkan Lurah

Penrang sebagai administrator pembangunan dapat lebih meningkatkan motivasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih menyadari bagaimana pentingnya pembangunan, dan masyarakat dapat memberikan partisipasinya secara optimal.

2. Dalam melaksanakan pembangunan, Kepala Kelurahan bukan hanya untuk melakukan sesering mungkin tetapi juga yang perlu diperhatikan sampai sejauh mana pembangunan itu.
3. Penggunaan biaya pelaksanaan pembangunan hendaknya direncanakan sebaik mungkin sehingga hambatan di dalam anggaran biaya pembangunan dapat diatasi dan dengan ini pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Lampiran I

**Struktur Organisasi Pemerintahan
Di Kelurahan Penrang Tahun 2002**



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teori

- Abdul Rahman, Arifin, H., 1990, *Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum*, Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Atmosudirjo, Prajudi, 1994, *Administrasi dan Manajemen*, Jakarta ; Gunung Agung.
- Bintoro Tjokroamidjoyo, 1990, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta ; LP3S.
- _____, 1986, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta ; Bina Aksara.
- Handyaningrat, Soewarno, Drs., 1986, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta ; Gunung Agung.
- Kancil, Cst., 1990, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta ; Aksara Baru.
- Komaruddin, Drs., 1992, *Pengantar untuk Memahami Pembangunan*, Jakarta ; Angkasa.
- Koentjaraningrat, 1992, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta ; PT. Gramedia.
- Pramudji, S., 1990, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta ; Bina Aksara.
- Riberu, D.R.J., 1986, *Dasar-dasar Kepemimpinan*, Jakarta ; Lappenas.
- Ruswara, Agustaha R., Hinratmo, 1986, *Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintah Daerah Kota dan Kelurahan*, Jakarta ; Gunung Agung.
- Siagian, S.P., 1987, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta ; Gunung Agung.
- _____, 1987, *Analisa Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Jakarta ; Gunung Agung.

B. Lain-lain

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. *Tentang Otonomi Daerah.*

Ketepatan MPR No. 11 tahun 1993.

